

POLA KOMUNIKASI MANAJEMEN KONFLIK: STUDI FENOMENOLOGI PADA POLISI HUTAN DI CAGAR BIOSFER CIBODAS

Communication Patterns On The Conflict Management: Phenomenological Study On The Forest Rangers In Cibodas Biosphere Reserve

Winarni^{1,2*}, Iriana Bakti¹, Herlina Agustin¹, Dandi Supriadi¹

¹Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, [\(022\) 84288828](tel:02284288828)

²Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, 08118612392

*Email: winarni21001@mail.unpad.ac.id

Diterima : 18/06/2022, Direvisi :28/11/2022, Disetujui : 01/12/2022

ABSTRACT

The current reality is showing that the communities surrounding Cibodas Biosphere Reserve (CBC) are still doing horrible things, as evidenced by the fact that they are still taking the resources from the forest or illegally entering the area. In this case, the Forest Police (Polhut) who have responsibility for maintaining forest security, need to act to minimize disturbances in the forest area. This study aims to obtain an overview of Polhut's communication patterns in dealing with disturbances at the Gunung Gede Pangrango National Park (TNGGP) as the core area of the CBR. This study used a qualitative method through a phenomenological approach with the communication effectiveness theory. The information-gathering was conducted through an in-depth interview with two Polhut TNGGP officers who have been experienced for more than ten years in their duties. The information was processed according to the communication methods and theories. The results showed that the communication pattern conducted by the Polhut to the communities used persuasive interpersonal communication and group communication. Polhut realized that they must be close to the communities so that they can invite them to act a role in protecting forest resources. However, the communication has not been effective because there are still some obstacles to the communities and some of the supporting factors for the effectiveness of communication have not been fulfilled.

Keywords: *Communication Patterns, Conflict Management, Effective Communication, Forest Police, Phenomenology.*

ABSTRAK

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar Cagar Biosfer Cibodas (CBC) masih saja melakukan tindakan yang tidak baik, terbukti dengan masih adanya pengambilan sumber daya dari dalam hutan maupun memasuki kawasan secara ilegal. Dalam hal ini, Polisi Hutan (Polhut) yang bertanggung jawab menjaga keamanan hutan, perlu bertindak untuk meminimalisir gangguan-gangguan di kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pola komunikasi yang dilakukan oleh Polhut dalam menghadapi gangguan-gangguan terhadap hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang merupakan area inti Cagar Biosfer Cibodas, khususnya intrusi ilegal masyarakat ke dalam hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan teori efektivitas komunikasi. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap dua orang Polhut TNGGP yang telah berpengalaman selama

lebih dari sepuluh tahun. Informasi kemudian diolah sesuai dengan metode dan teori komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan oleh Polhut kepada masyarakat menggunakan komunikasi interpersonal persuasif dan komunikasi kelompok. Polhut menyadari bahwa mereka harus dekat dengan masyarakat, sehingga dapat mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dalam menjaga sumber daya hutan. Meskipun demikian, komunikasi belum berjalan efektif karena masih ditemukan beberapa kendala dengan masyarakat dan beberapa faktor pendukung efektivitas komunikasi belum terpenuhi.

Kata kunci: fenomenologi, komunikasi efektif, manajemen konflik, pola komunikasi, polisi hutan.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan hasil dari adanya interaksi antar manusia. Interaksi tersebut akan menjadi konflik jika pelaku interaksi memiliki persepsi yang berbeda. Dalam setiap lini kehidupan manusia dapat ditemukan konflik (Agustin et al., 2019; Purwanto, Hariyanto, et al., 2013). Salah satunya di kawasan konservasi seperti Cagar Biosfer Cibodas. Konflik di kawasan konservasi biasanya terjadi karena perbedaan persepsi, pengetahuan, tata nilai, kepentingan dan klain atau akuan (Tadjudin, 1999). Pemanfaatan sumber daya dan perbedaan persepsi (Purwanto, Hariyanto, et al., 2013) memicu timbulnya konflik di Cagar Biosfer Cibodas.

Konflik yang terjadi di kawasan cagar biosfer terjadi karena beberapa aspek, diantaranya yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dimana masyarakat masih mengambil sumber daya dari kawasan cagar biosfer untuk dijual maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan pemerintah yang tidak saling mendukung upaya konservasi, hal tersebut terlihat dari masih adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai. Minimnya pemahaman masyarakat atas kepemilikan lahan konservasi yang menanggapi bahwa tanah konservasi merupakan milik masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma. Selain itu, setiap stakeholder memiliki persepsi dan pemahaman yang berbeda sehingga terjadi kesalahan komunikasi dan informasi, hubungan kawasan dengan masyarakat yang kurang harmonis, penegakan hukum rendah, dan tingkat pendidikan masyarakat di sekitar cagar biosfer masih rendah (Hakim et al., 2018). Sama halnya dengan di Cagar Biosfer Cibodas, dimana terdapat beberapa konflik yang terjadi antara masyarakat dan pengelolanya. Berdasarkan data laporan statistik TNGGP kita dapat mengetahui beberapa gangguan yang terjadi di kawasan ini. Gangguan yang terjadi berupa perubahan fungsi lahan, terganggunya habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa khas, degradasi ekosistem, dan kebijakan (Purwanto, Hariyanto, et al., 2013).

Konflik yang sering terjadi di kawasan Cagar Biosfer Cibodas adalah pencurian sumber daya alam berupa pencurian kayu hutan dari pohon rasamala (*Altingia excelsa*), kayu puspa (*Schima walichii*), kihut (*Glochidion rubrum*), huru leer (*Litsea mappacea*), dan non kayu berupa anggrek, bunga edelweiss (*Anaphalis javanica*), batang pakis (*Cyathea contaminans*), buah-buahan (*Passiflora quadrangularis*/markisa/konyal), kulit kayu bernilai ekonomis seperti kayu manis (*Cinnamomum burmannii*), damar (*Agathis borneensis*) dan kayu kilemo (*Litsea cubeba*). Selain itu, masyarakat juga masih melakukan pemburuan terhadap hewan di kawasan cagar biosfer cibodas, yaitu babi hutan, trenggiling (Purwanto, Hariyanto, et al., 2013) dan burung (TNGGP, 2020).

Di bawah ini merupakan laporan jumlah konflik atau pemanfaatan/pengambilan sumber daya di kawasan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sebagai area inti cagar biosfer cibodas, yaitu:

Table 1. Daftar Gangguan dan Pelanggaran Pidana di TNGGP tahun 2016-2020; sumber TNGGP

Table 1. List of Criminal Disturbances and Violations in TNGGP 2016-2020; TNGGP source

No	Jenis Gangguan	Jumlah					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pencurian dan penebangan kayu:	20	5	-	-	-	Batang: pinus, afrika, kaweni, mara Tunggak: pinus, alpukat, damar, manglid Pohon: pinus, mahoni, manglid, suren, Eucalyptus
	a. Tunggak	5	10	-	-	-	
	b. Pohon	24	20	41	23	34	
	c. Batang						
2	Perambahan hutan	433.59	433.59	433.59	513.15	532,36	hektar
3	Pemburuan liar	10	6	7	25	13	ekor burung
4	Pencurian hasil hutan lain						pikul ikat batang batang spesimen kg
	a. Kayu bakar	182	124	6	4	-	
	pikul	120	64	61	39	19	
	b. Kayu bakar	347	280	-	-	63	
	ikat	-	-	100	42	-	
	c. Batang bambo	-	-	-	-	12	
	d. Batang kayu	-	-	-	-	40	
e. Tanaman hias							
f. Kulit kayu manis							
5	Tindak pidana tahun 2017 pemburuan cacing sonari di Rawa Gede	-	77 cacing sonari	-	-	-	Penjara 2 bulan 21 hari dan denda Rp 120.000

Terjadinya konflik atau gangguan terhadap kawasan cagar biosfer di atas, mengindikasikan bahwa masyarakat masih banyak bergantung pada keberadaan kawasan inti cagar biosfer. Di saat masyarakat membutuhkan sesuatu yang tersedia di dalam kawasan cagar biosfer, mereka akan memasuki kawasan tersebut dan mengambil sumber daya tersebut tanpa memperhatikan apakah sumber daya tersebut boleh diambil atau tidak. Hal tersebut terjadi kepada masyarakat yang mengambil cacing sonari di area hutan rimba cagar biosfer Cibodas yang akhirnya dipidanakan dan mendapatkan hukuman penjara (Iqbal, 2017). Cagar biosfer merupakan harapan hidup bagi sebagian besar masyarakat di sekitarnya. Contohnya terjadi di Cagar Biosfer Sundarban, India, dimana sebagian masyarakatnya memiliki tingkat ekonomi rendah, sehingga sangat bergantung pada keberadaan cagar biosfer. Masyarakat mencari nafkah dengan pengambilan sumber daya kayu dan non kayu seperti madu, penangkapan ikan baik legal dan illegal (Ghosh, 2015). Di kawasan Cagar Biosfer Cibodas sendiri, masyarakatnya masih banyak yang memanfaatkan sumber daya baik tumbuhan maupun hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan tumbuhan berpotensi invasif sebanyak 72 jenis tanaman obat (Handayani, 2021) yang dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan Cagar Biosfer Cibodas.

Pemanfaatan sumber daya alam hutan oleh masyarakat dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia. Terdapat sebanyak 89.326 tumbuhan

berspora, termasuk paku pakuan, dan 19.232 spesies tumbuhan berbunga (Widyatmoko, 2019) yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Tetapi sumber daya tersebut perlu dijaga agar tidak habis dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam rangka menjaga dan memelihara kekayaan hayati tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang saat ini telah berintegrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berupaya untuk menetapkan kawasan konservasi yang ada di Indonesia sebagai kawasan cagar biosfer. Cagar biosfer merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada kawasan yang memenuhi syarat tertentu seperti memiliki fungsi sebagai tempat konservasi keanekaragaman hayati, melindungi keragaman geneti, dan mendukung kegiatan penelitian, pelatihan maupun Pendidikan (Batisse, 1982). Cagar biosfer diakui oleh dunia untuk mengelola kawasan (ekosistem darat, pesisir, dan laut) dengan tujuan untuk melakukan upaya konservasi sumber daya dan ekosistemnya untuk kepentingan sosial ekonomi berkelanjutan (Batisse, 1982; Purwanto et al., 2017).

Pengelolaan cagar biosfer di Indonesia dilakukan secara lintas sektoral yang dipimpin komite *Man and The Biosphere* (MAB) Indonesia. Anggota komite MAB merupakan perwakilan dari masing-masing stakeholder yaitu pemerintah daerah yang memiliki cagar biosfer; Pengelola Kawasan Konservasi (Ditjen Konservasi SDA dan Ekosistem, Kementerian KLHK); para pakar di bidang konservasi dan pembangunan berkelanjutan baik dari lembaga penelitian, perguruan tinggi dan individu pakar; pihak swasta; LSM nasional dan Internasional; dan tokoh masyarakat (Purwanto, Prasetya, et al., 2013).

Upaya konservasi sumber daya alam hayati di cagar biosfer merupakan tanggung jawab semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Selain upaya kuat dari Lembaga pemerintah yang ditunjuk, dukungan penuh dari masyarakat sangat diperlukan bagi kawasan konservasi sebagai tempat pelestarian kekayaan hayati agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Widyatmoko, 2019). Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui dan ikut terlibat dalam pelestarian sumber daya alam hayati ini. Hal tersebut juga tertuang dalam tujuan dari penobatan cagar biosfer, bahwa pengelolaan cagar biosfer harus melibatkan seluruh komponen masyarakat di kawasan cagar biosfer (Hidayat, 2021). Hal tersebut terbukti di Cagar Biosfer Kafa, Ethiopia dimana mereka melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan cagar biosfer agar degradasi lahan yang terjadi sejak lama dapat dikurangi (Jackson et al., 2021).

Tetapi pada kenyataannya, masyarakat di sekitar Cagar Biosfer Cibodas masih kurang memahami tanggung jawab tersebut, sehingga masih ditemukan pelanggaran dan gangguan di kawasan Cagar Biosfer Cibodas. Hal ini akan berdampak buruk terhadap upaya konservasi sumber daya hayati di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai area inti cagar biosfer. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi gangguan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas keamanan yaitu melalui upaya komunikasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Cagar Biosfer Cibodas. Upaya tersebut dilakukan oleh petugas polisi hutan (Polhut). Polisi hutan sebagai garda terdepan dalam mengatasi gangguan dan sebagai penjaga keamanan hutan merupakan pihak yang memiliki peran besar dalam meminimalisir konflik dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola komunikasi, proses pendekatan dan hambatan yang dihadapi polhut dalam proses komunikasi untuk mensosialisasikan aturan pemanfaatan sumber daya dalam rangka mengurangi gangguan di kawasan Cagar Biosfer Cibodas.

METODE

Penelitian ini dilakukan di kawasan Cagar Biosfer Cibodas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dengan informan kunci yaitu polisi hutan. Polisi Hutan merupakan pihak yang paling dekat berhubungan dan melakukan interaksi dengan masyarakat di cagar biosfer. Mereka saling mengenal karena polisi hutan memiliki kantor yang berdampingan langsung

dengan rumah penduduk sehingga mereka sudah memahami sifat dari masyarakat tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba untuk memahami sebuah fenomena melalui gambaran dari pengalaman manusia (Littlejohn & Foss, 2009; Sugiyanto et al., 2017), yaitu pengalaman polisi hutan dalam melakukan interaksi dengan masyarakat. Pendekatan ini percaya bahwa melalui pengalaman langsung kita akan menemukan sebuah pengetahuan, setiap orang memiliki makna yang berbeda tentang sesuatu hal dan makna tersebut akan tergambarkan melalui bahasa yang digunakan (Littlejohn & Foss, 2014). Dengan menggali pengalaman dari polisi hutan sebagai penjaga keamanan hutan, kita akan mengetahui pola komunikasi yang mereka gunakan, bagaimana mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat, bagaimana interaksi yang terjalin diantara polisi hutan dan masyarakat dan hambatan dalam komunikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas komunikasi. Komunikasi akan berlangsung efektif jika mencapai tujuan komunikasi. Komunikasi dapat berjalan efektif jika disampaikan oleh orang yang kredibel dan emnarik, pesan yang disampaikan diatur dengan baik, dan disampaikan dengan kombinasi saluran yang berbeda-beda (S. Djuarsa Sendjaja, 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, penelusuran literatur dan observasi/pengamatan di lapangan. Penentuan informan menggunakan teknik purposif. Sebanyak 1 orang informan kunci yang merupakan kepala polisi hutan (Kasat) dan 1 orang informan tambahan yang merupakan kepala resort. Informan kunci penelitian ini berinisial AS. Beliau telah bekerja di TNGGP sejak tahun 2005 dan menjabat sebagai polisi hutan ahli muda. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala polisi hutan dan telah banyak bergelut dalam upaya perlindungan hutan. Informan kedua merupakan polisi hutan dengan inisial MAJ. Telah bekerja sebagai polisi hutan sejak tahun 2000 dan ditempatkan di TNGGP sejak 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala resort Cibodas.

Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang pengalaman polisi hutan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Interaksi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat baik masyarakat umum maupun mereka yang melakukan pelanggaran. Pertanyaan penelitian mencakup bagaimana pola komunikasi yang diterapkan oleh polisi hutan dengan masyarakat, tantangan dan hambatan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, serta pengalaman-pengalaman yang dialami selama bertugas sebagai polisi hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polisi hutan merupakan sebuah jabatan yang diemban ASN di Kementerian maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas untuk melindungi hutan dan kekayaan alam hayati serta ekosistemnya (PermenpanRB No 21, 2019). Dalam peraturan tersebut polisi hutan wajib melakukan persiapan, melakukan kegiatan, mengembangkan upaya pengamanan, melakukan pemantauan, evaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan perlindungan dan pengamanan yang dilakukan (Aswir et al., 2017). Polisi hutan sudah ada sejak tahun 1592 dengan nama *pengalasan*, mereka memiliki tugas untuk kekayaan hayati di dalam hutan Indonesia (KLHK, 2022). Mereka memiliki tugas berat yang diemban sebagai garda terdepan dan peran yang penting dalam melindungi dan mengamankan hutan. Berdasarkan permenpanRB tentang jabatan polisi hutan, maka mereka memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan dan penganggulangan terhadap tindak kejahatan di kawasan hutan Indonesia. Penanganan pelanggaran seperti pengambilan sumberdaya dari hutan dan perusakan seperti penebangan pohon. Selain itu, masih banyak para pendaki yang melakukan pelanggaran kegiatan pendakian.

Konflik merupakan sebuah akibat dari terjadinya interaksi, sehingga konflik bisa terjadi

dimana-mana. Konflik biasanya timbul karena adanya perselisihan akibat perbedaan persepsi/pemahaman, kepentingan, dan kelangkaan sumberdaya dari para pelaku konflik (Agustin et al., 2019; Purwanto, Hariyanto, et al., 2013). Konflik yang terjadi di cagar biosfer di Indonesia cukup banyak terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar. Contoh konflik yang terjadi di cagar biosfer di Indonesia adalah konflik pemanfaatan sumber daya alam di Taman Nasional Gunung Leuser. Di sana ditemukan gangguan sumber daya alam berupa pencurian kayu, perambahan, pembakaran dan perburuan (Harefa, 2021). Konflik tersebut masih terjadi karena adanya tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah (Surono, 2012). Selain di Taman Nasional Leuser, Cagar Biosfer di Jawa Timur juga menghadapi konflik tenurial akibat dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebijakan yang bertumpuk, perbedaan pemahaman, informasi dan komunikasi yang kurang baik, ego sektoral masing-masing stakeholder, dan rendahnya tingkat pendidikan (Hakim et al., 2018).

Di area inti Cagar Biosfer Cibodas atau dikenal dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terjadi pula konflik tenurial, konflik tata guna lahan, dan konflik pemanfaatan sumber daya alam. Konflik tersebut terjadi karena perbedaan persepsi, tata nilai, kepentingan, dan pengakuan kepemilikan (Purwanto, Hariyanto, et al., 2013). Manajemen konflik yang dilakukan untuk mengurangi konflik tersebut, terutama dalam hal konflik pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dan menjaga keamanan ekosistem hutan, yaitu dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keamanan sebagai masyarakat mitra polhut (wawancara dengan informan 1&2 pada 27 April dan 1 Juni 2022).

Konsep diri polisi hutan

Polisi hutan menyadari bahwa masyarakat yang melakukan gangguan di area inti cagar biosfer tidak bertujuan untuk merusak area tersebut. Masyarakat mengambil sumber daya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat menyadari bahwa pengambilan sumberdaya dari area inti cagar biosfer tidak diperkenankan, tetapi mereka belum mengetahui detail aturan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, polhut berusaha untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diambil dari area cagar biosfer cibodas. Kesadaran polhut tentang kondisi masyarakat ini merupakan bentuk konsep diri yang positif. Polhut menyadari bahwa sebagai orang yang lebih memahami aturan, memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya itu kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi mengambil sumber daya secara salah. Selain itu, sebagai person yang lebih memahami aturan, tidak menjadikan polhut menjadi sombong dan merasa lebih baik dari masyarakat. Menurut William D. Brooks menjelaskan bahwa konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri (Rakhmat, 2021). Polisi hutan sangat menyadari dirinya, tugasnya dan tanggung jawabnya.

Menjadi polisi hutan merupakan takdir hidup yang harus dijalani sebaik-baiknya. Jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari Yang Maha Kuasa sebagai jalan jihad (wawancara informan 1 dan 2 tanggal 25 Mei dan 1 Juni 2022). Konsep diri yang dimiliki oleh kedua informan adalah positif. Hal tersebut terlihat dari sikap mereka dalam menghadapi masalah/konflik. Orang yang memiliki konsep diri positif memiliki karakteristik percaya diri; memiliki nilai yang sama dengan orang lain; dapat menerima pujian dengan baik; sadar akan perbedaan keinginan, perasaan, dan perilaku setiap orang; serta mampu memperbaiki diri dan jujur akan kekurangan diri sendiri (Rakhmat, 2021). Dari kelima karakteristik tersebut, berdasarkan pengamatan penulis dengan informan saat wawancara terlihat karakter informan yaitu percaya diri, merasa memiliki nilai yang sama dengan orang lain, menerima pujian dengan baik, menyadari akan adanya perbedaan keinginan, perasaan dan perilaku yang dimiliki setiap orang serta tidak malu untuk mengakui keterbatasan yang dimiliki oleh polhut. Latar belakang keluarga, kelompok pergaulan dan pertemanan turut membentuk konsep diri tersebut. Hal tersebut seperti yang disebutkan oleh Jalaluddin Rakhmat tentang konsep diri

yang dipengaruhi oleh orang lain yang dekat dengan kita dan kelompok rujukan (Rakhmat, 2021).

Pola komunikasi

Interaksi antara polhut TNGGP dengan masyarakat cukup dekat. Polhut menggunakan komunikasi persuasif dalam kegiatan penyuluhan maupun pembinaan. Pola komunikasi persuasif ini merupakan komunikasi yang digunakan untuk mengajak penerima pesan karena komunikasi persuasif bertujuan untuk mempengaruhi sikap, nilai pendapat dan perilaku penerima pesan (Soemirat & Suryana, 2014). Selain itu, polhut menggunakan komunikasi interpersonal dalam pembinaan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena komunikasi interpersonal akan membuat kita menemukan identitas diri, menjalin hubungan baik dengan orang lain, melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah yang timbul di sekitar kita (Wood, 2009). Polhut menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar taman nasional dengan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Mereka melepaskan seragam sebagai polhut dan menjalin hubungan pertemanan tanpa syarat. Dengan menjadi teman dan bagian dari masyarakat, maka mereka akan lebih mudah mengajak berbicara masyarakat dan membuatnya peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hutan. Polhut bukanlah musuh, tetapi teman, kerabat bahkan saudara. Upaya pendekatan yang dilakukan polhut tersebut adalah cara agar terbangun kepercayaan masyarakat terhadap polhut (wawancara informan 1 tanggal 25 Mei 2022). Polhut telah menerapkan teori untuk membangun hubungan interpersonal yang paling utama, yaitu kepercayaan. Menurut Jalaluddin Rakhmat, kepercayaan dapat terbangun jika kita selalu bersikap menerima, berempati dan jujur. Selain kepercayaan juga diperlukan sikap yang suportif bukan defensif dan sikap terbuka (Rakhmat, 2021). Dengan menerapkan sikap-sikap tersebut, maka komunikasi interpersonal akan terjalin dengan efektif.

Selain itu, pola komunikasi *two step communication* juga digunakan dalam program penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Pola komunikasi *two step flow communication* merupakan salah satu pola komunikasi yang menggunakan tokoh masyarakat yang memiliki berpengaruh dan dipercaya di masyarakat untuk menyampaikan pesan dari pembuat pesan sehingga pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima pesan (S. Djuarsa Sendjaja, 2013). Tokoh masyarakat yang digandeng oleh polhut TNGGP adalah tokoh agama, kepala desa, dan orang yang memiliki pengaruh di masyarakat (wawancara dengan informan 1, tanggal 25 Mei 2022).

Kegiatan komunikasi dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kawasan konservasi menggunakan komunikasi kelompok melalui kegiatan kemah konservasi dan pendidikan lingkungan (dikling) yang diikuti oleh siswa sekolah di area penyangga maupun transisi (wawancara informan 1, tanggal 25 Mei 2022). Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dengan jumlah peserta lebih dari 3 orang, dengan tujuan tertentu (Sasa Djuarsa Sendjaja & Rahardjo, 2015). Selain komunikasi formal, tim polhut juga melakukan komunikasi informal yang dilakukan secara tidak terstruktur saat bertemu dengan masyarakat yang sedang mengambil sumber daya di dalam hutan. Komunikasi informal ini merupakan bentuk komunikasi persuasif karena Polhut dalam menjelaskan aturan pemanfaatan sumber daya hutan, meminta agar masyarakat tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran yang menyebabkan timbulnya konflik dan rusaknya sumber daya hutan. Komunikasi yang dilakukan polhut tanpa mengedepankan ego, polhut menyadari masyarakat bukan manusia yang bersalah tetapi belum mengetahui aturannya (wawancara informan 1, tanggal 19 Mei 2022).

Kendala

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada tanggal 25 Mei 2022, informan

menyampaikan beberapa kendala yang mereka hadapi dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Kendala *pertama* yang dihadapi polhut dalam menjalankan tugasnya adalah keterbatasan SDM. Jumlah Polhut di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebanyak 36 orang (wawancara informan 1 tanggal yang dibagi ke 15 (lima belas) resort TNGGP (tabel 2). Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai area inti Cagar Biosfer Cibodas memiliki luas 24.270,8 hektar (TNGGP, 2020). Dengan luasan tersebut, polhut harus bekerja keras dalam menjaga hutan karena masih banyak ditemui pelanggaran di TNGGP ini (Intan, 2021). Jumlah ideal untuk memaksimalkan pengawasan terhadap sumber daya hutan, setidaknya setiap satu orang polhut mampu mengawasi area seluar 20-25 hektar (Mufid, 2020).

Table 2. Data Luasan Resort di TNGGP (sumber data: statistik TNGGP)

Table 2. Resort area data in TNGGP (data source: TNGGP statistics)

NO	BIDANG/RESORT	LUAS
I	Wilayah 1 Cianjur	
1	Resort Cibodas	1.750,23
2	Resort Wisata Mandalawangi	118,22
3	Resort Gunung Putri	767,52
4	Resort Sarongge	1.115,65
5	Resort Tegalega	1.750,66
II	Wilayah II Sukabumi	
6	Resort Goalpara	1.011,94
7	Resort Selabintana	2.547,23
8	Resort Situgunung	2.092,79
9	Resort Cimungkad	1.293,20
10	Resort Nagrak	1.655,07
11	Resort Pasir Hantap	2.439,32
III	Wilayah III Bogor	
12	Resort Bodogol	2.210,42
13	Resort Cimande	2.381,78
14	Resort Tapos	1.163,77
15	Resort Cisarua	1.972,98
	TOTAL LUASAN	24.270,80

Kendala *kedua* yang disampaikan informan adalah kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah. Hal tersebut terbukti dengan bertambahnya jumlah gangguan yang terjadi (tabel 3) dan adanya kegiatan pendakian saat TNGGP melakukan penutupan kegiatan pendakian (wawancara informan 1 tanggal 25 Mei 2022). Pada saat pendakian ditutup seharusnya tidak ada pendaki di atas gunung, tetapi pada kenyataannya masih banyak pendaki yang ditemukan di sepanjang jalur pendakian dan di puncak gunung (figure 1, diambil pada tanggal 30 Oktober 2021 saat kegiatan pendakian ditutup karena PPKM). TNGGP melakukan penutupan secara rutin setiap bulan Januari-Maret dan Agustus-September. Selain kedua waktu tersebut, pendakian juga ditutup pada waktu tertentu seperti saat PPKM sesuai arahan dari pemerintah setempat. Penutupan pendakian dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kondisi ekosistem yang baik bagi tumbuhan dan satwa di TNGGP.

Penutupan pendakian akan memberikan kesempatan kepada tumbuhan dan hewan untuk berkembang biak. Hal tersebut dikarenakan keberadaan manusia dapat mengganggu siklus hidup hewan dan tumbuhan, sehingga dengan menutup pendakian berarti memberikan hak hidup bagi hewan dan tumbuhan. Selain itu, pada awal tahun, di kawasan Cibodas biasanya terjadi angin kencang dan hujan deras. Hal ini menyebabkan beberapa pohon yang mungkin sudah tua akan mudah tumbang. Hujan deras akan berakibat pada menurunnya suhu udara menjadi cukup dingin, sehingga dapat mengancam keselamatan manusia seperti hujan badai dan hipotermia. Alasan ketiga penutupan pendakian yang dilakukan pada bulan Agustus

hingga September karena pada saat tersebut adalah musim kemarau sehingga rawan menjadi penyebab kebakaran hutan.

Table 3. Jenis Gangguan di TNGGP tahun 2020-2021 (sumber Polhut TNGGP)

Table 3. Types of disturbances in TNGGP 2020-2021 (source from TNGGP Forest Police)

NO	JENIS GANGGUAN	SATUAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Pencurian kayu	batang	34	708
2	Pencurian kayu bakar	ikat	19	33
3	Pencurian bambu	Batang	63	100
4	Tanaman hias	Pohon	12	-
5	Pemburuan liar	ekor	13	11

Penutupan pendakian akan diinformasikan kepada masyarakat terutama yang melayani jasa porter dan pengunjung umum. Pengumuman penutupan biasanya akan dipasang di papan pengumuman dan halaman kantor TNGGP. Selain itu, informasi juga disampaikan melalui media sosial lembaga untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Walaupun informasi mengenai penutupan pendakian sudah disebar dan kebanyakan event organizer yang melayani jasa simaksi maupun porter pendakian mengetahui hal tersebut.



Gambar 1. Foto Pendaki di Kandang Badak TNGGP saat penutupan 30 Oktober 2021, foto: Dokumentasi Pribadi Intani Q.L.

Figure 1. Photo of a climber at the TNGGP Badak Cages at closing on 30 October 2021, photo: Personal Documentation of Intani Q.L.

Ternyata masih ada saja pendaki ilegal yang ditemukan pada saat penutupan pendakian. Masih banyak porter yang menerima pemesanan porter dan simaksi saat pendakian dilarang. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketegangan antara polhut dan EO maupun pendaki ilegal (wawancara informan 2, tanggal 23 Mei 2022). Namun data mengenai jumlah pendaki ilegal tidak tersedia, karena biasanya pendaki menggunakan jalur yang tidak resmi. "Pendakian ilegal kalau di Cianjur itu ada 32 mbak, jalur tikusnya. Itu dipakai untuk pendakian, dipakai masyarakat juga untuk masuk ke hutan" (wawancara informan 2, tanggal 23 Mei dan 6 Juni 2022).

Kendala lain yang masih dihadapi oleh polhut diantaranya ketersediaan materi-materi tentang hutan yang digunakan sebagai sarana dalam pembelajaran kepada masyarakat masih terbatas. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan, polhut hanya menyampaikan informasi secara lisan maupun tertulis berupa pengumuman di papan informasi resort maupun papan

informasi di sepanjang jalur pendakian (*figure 2, papan pengumuman di jalur pendakian*). Kendala berikutnya adalah ego sektoral tiap stakeholders masih sangat tinggi. Stakeholder yang paling berpengaruh adalah masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat lebih memprioritaskan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini, tanpa memprioritaskan terjaganya kawasan konservasi sementara pemerintah daerah hanya berfokus pada kenaikan PAD.



Gambar 2. Papan Pengumuman Di Jalur Pendakian, Foto: Dokumentasi Pribadi Intani Q.L.
 Figure 2. Announcement Board on the Hiking Trail, Photo: Personal Documentation of Intani Q.L.

Pengelolaan kawasan konservasi dan wisata tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sehingga jika salah satu pihak tidak turut berperan, maka upaya yang telah dilakukan tidak akan berhasil secara efektif.

Efektivitas komunikasi

Menurut Dedy Mulyana, komunikasi efektif merupakan komunikasi yang berhasil mencapai tujuan dilakukannya komunikasi. Bagaimana kita dapat menghasilkan komunikasi yang efektif, yaitu dengan memahami pihak lain, menjadi diri sendiri melalui konsep diri yang positif, membangun hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan, dan melakukan komunikasi yang berempati (Sobur & Mulyana, 2020). Sementara menurut Stewarrt L. Tubbs dan Sylvia Moss mengatakan bahwa komunikasi dikatakan efektif jika menimbulkan pengertian yang sama pada penerima pesan dan pemberi pesan, komunikasi menimbulkan kesenangan bagi pelaku komunikasi, mempengaruhi sikap penerima pesan, menciptakan hubungan sosial yang baik, dan bisa menghasilkan tindakan yang dikehendaki (Rakhmat, 2021). Komunikasi efektif juga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Komunikator harus kredibel, memiliki keahlian, berwibawa, memiliki kekuasaan, dan menarik. Polhut di TNGGP merupakan pegawai PNS yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengamanan kawasan hutan. Mereka merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya karena memahami aturan yang berlaku di kawasan hutan TNGGP. Kredibilitas sumber atau komunikator dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu keahlian dan pengetahuan tentang materi yang disampaikan, sikap terpercaya yang ditampilkan berupa kejujuran, ketulusan, kepercayaan diri dan sopan santun serta daya tarik fisik maupun non fisik yang dimiliki komunikator dalam hal ini adalah polhut (Winoto, 2016).

Keahlian polhut dan kepercayaan dari penerima berpengaruh besar terhadap perubahan sikap (Kosasih et al., 2017).

Table 4 Data Pegawai Polhut TNGGP (sumber: statistik TNGGP 2020)
 Table 4 TNGGP Forest Police Officer Data (source: TNGGP statistics 2020)

No	Data Polhut	Jumlah	keterangan
1	Tingkat Pendidikan:		
	S2	2 orang	
	S1/D4	5 orang	
	D3	13 orang	
	SLTA	16 orang	
2	Golongan ruang:	31 orang	
		5 orang	
3	Pelatihan yang pernah diikuti:		
	- Pemetaan konflik tenurial	2 orang	7 hari
	- Penjenjangan Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Ahli Jenjang Madya	2 orang	10 hari
4	Polhut yang mengikuti diklat	23 orang	2016-2020

Kredibilitas komunikator dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun non formal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian (Winoto, 2016).

2. Pesan yang akan disampaikan harus terstruktur dengan baik dan memenuhi seluruh elemen pesan. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh penerima pesan, lengkap, ringkas, nyata dan benar agar tidak menimbulkan multi tafsir pada penerima pesan. Pesan yang disampaikan dapat berupa pesan verbal maupun nonverbal yang diucapkan polhut saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain pesan yang dikomunikasikan secara langsung, polhut menyampaikan pesan melalui media konvensional dan media sosial menggunakan bahasa nasional yang dimengerti oleh seluruh masyarakat.



Gambar 3. Pengumuman Penutupan Yang Dipasang Di Tempat Strategis Dan Media Online (sumber foto: Instagram @bbtn_gn_gedepangrango)
Figure 4. Closing Announcements Posted in Strategic Places and Online Media (photo source: Instagram @bbtn_gn_gedepangrango)

3. Menggunakan saluran komunikasi yang sesuai dengan target penerima pesan. Saluran pesan yang dapat dipilih dan dikombinasikan, yaitu saluran komunikasi personal, media massa atau media konvensional disesuaikan dengan karakteristik pesan. Tim polhut dan penyuluh mengkombinasikan saluran komunikasi untuk mencapai target audiens yang beragam. Polhut melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mendatangi masyarakat dan berkomunikasi secara informal. Penyampaikan informasi juga menggunakan media online yaitu media sosial lembaga yaitu Instagram @bbtn_gn_gedepangrango.
4. Penerima pesan harus memiliki karakteristik sebagai penggarap informasi, *problem solver*, mediator, selalu mencari pembela, anggota kelompok, kelompok, memiliki selera dan media (S. Djuarsa Sendjaja, 2013). Masyarakat di sekitar Cagar Biosfer Cibodas merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, buruh, pedagang, dan pekerja. Bertambahnya jumlah gangguan dari tahun 2020 hingga tahun 2021, membuktikan bahwa masyarakat belum dapat dikatakan sebagai komunika tertarik dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi yang efektif akan berdampak pada perubahan sikap dan perilaku penerima pesan (Nisa, 2016).

KESIMPULAN

Hutan cagar biosfer yang juga merupakan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan manusia yang perlu dijaga keamanan ekologi maupun sumber dayanya. Polhut merupakan penjaga hutan yang dalam arti lain juga memiliki peranan penting dalam menjaga kehidupan umat manusia.

Selama melakukan interaksi dengan masyarakat tersebut, polhut menggunakan pola

komunikasi interpersonal, persuasive, kelompok, dan *two step flow communication*. Pola interaksi dalam komunikasi dilakukan dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan pertemanan. Polhut menjadi anggota masyarakat agar dapat berbicara dan bisa mempengaruhi sikap serta tindakan masyarakat. Komunikasi dilakukan secara informal melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat. Kegiatan formal yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan adalah kegiatan kemah konservasi dan dikling yang diikuti oleh siswa sekolah di sekitar cagar biosfer cibodas. Pola komunikasi yang cukup efektif untuk diterapkan di kawasan TNGGP adalah pola komunikasi interpersonal dan *two step flow communication*, yaitu dengan bantuan tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang masih dipercaya oleh masyarakat.

Masih ditemukan kendala dalam proses komunikasi yang dilakukan polhut dalam proses pembinaan dan penyuluhan berupa kekurangan sumber daya manusia dalam mengurangi gangguan yang dilakukan masyarakat. Dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat, polhut dibantu oleh Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), penyuluh, dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Tetapi masih diperlukan tambahan jumlah personil dengan jumlah ideal dalam melakukan pengamanan hutan. Perbandingan jumlah ideal polhut dengan luasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya yaitu 1 orang polhut:25 hektar. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus karena dalam model strategi komunikasi advokasi, komunikasi efektif dapat terwujud jika dilakukan secara berkesinambungan (Cangara, 2017). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar cagar biosfer diperlukan upaya penyediaan sumber pemenuhan kebutuhan di luar kawasan inti, sehingga masyarakat tidak perlu lagi masuk ke dalam hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Materi-materi tentang hutan sebagai sarana dalam pembelajaran dapat ditambah dan dilengkapi oleh polisi hutan dengan meningkatkan kreativitas dan kapabilitas dari segi pembuatan media informasi dan cara komunikasi dengan mengikuti diklat maupun pelatihan.

KETERBATASAN

Penelitian ini belum dilakukan secara menyeluruh, baru dilakukan kepada staf polhut. Persepsi masyarakat tentang penunjang cagar biosfer maupun jasa ekosistem CBC perlu dilakukan agar pengelola CBC dapat mengambil kebijakan sesuai kebutuhan cagar. Ke depan perlu dilakukan penelitian lanjutan terutama terkait dengan persepsi masyarakat tentang jasa ekosistem CBC agar gambaran tentang Cagar Biosfer Cibodas di mata masyarakat dapat diketahui.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah memberikan dukungan biaya belajar melalui beasiswa *Degree by Research* (DBR) 2021, Kepala Satuan Polhut Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kepala Resot Cibodas yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., Hidayat, D. R., & Supriadi, D. (2019). Anatomi Konflik Komunikasi dalam Penanganan Neglected Tropical Disease di Media Sosial. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 14–34. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v11i1.1109>
- Aswir, Ibrahim, Abdullah, & Djufri. (2017). PERANAN POLISI HUTAN DAN PETUA UTEUN (PANGLIMA HUTAN) DALAM MENJAGA PELESTARIAN HUTAN DI PEDALAMAN

- KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE. Seminar Nasional II USM 2017, 1, 455–461.
- Batisse, M. (1982). The Biosphere Reserve: A Tool for Environmental Conservation and Management. *Environmental Conservation*, 9(2), 101–111. <https://doi.org/10.1017/S0376892900019937>
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ghosh, P. (2015). Conservation And Conflicts In The Sundarban Biosphere Reserve, India. *Geographical Review*, 105(4), 429–440. <https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2015.12101.x>
- Hakim, L., Aldianoveri, I., Bangsa, I. K., & Guntoro, D. A. (2018). Peran Dan Dampak Konflik Tenurial Kehutanan Bagi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Kawasan Cagar Biosfer Di Jawa Timur. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 43–51.
- Handayani, A. (2021). Pemanfaatan dalam pengelolaan spesies tumbuhan asing berpotensi invasif di cagar biosfer cibodas aisyah handayani. Institut Pertanian Bogor.
- Harefa, W. H. (2021). Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan. 1, 1–13.
- Hidayat, A. D. E. B. (2021). Analisis keberlanjutan pengelolaan cagar biosfer cibodas tesis.
- Intan, P. (2021). Mengenal Polisi Hutan, Sosok Penjaga Paru-paru Dunia. <Http://Travel.Detik.Com>.
- Iqbal, D. (2017). Miris... Gara-gara Cacing Sonari, Kerusakan TN Gede Pangrango Makin Menjadi. <Www.Mongabay.Co.Id>.
- Jackson, R., Shiferaw, A., Taye, B. M., & Woldemariam, Z. (2021). Landscape multifunctionality in (and around) the Kafa Biosphere Reserve: a sociocultural and gender perspective. *Landscape Research*, 46(1), 50–63. <https://doi.org/10.1080/01426397.2020.1831460>
- KLHK, G. (2022). Tentang Polisi Hutan. <Https://Polhut.Menlhk.Go.Id>.
- Kosasih, E. J., Setianti, Y., Kesehatan, D., Bandung, K., & Padjadjaran, U. (2017). PENGARUH KREDIBILITAS PETUGAS TERHADAP SIKAP KEPATUHAN. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 1–10.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia Of Communication Theory* (S. W. Littlejohn & K. A. Foss (eds.); 1st ed.). SAGE Publication Inc.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2014). *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*. Salemba Humanika.
- Mufid, F. R. (2020). Penjaga Hutan Kaltara Belum Ideal. <Korankaltara.Com>.
- Nisa, H. (2016). Komunikasi Yang Efektif Dalam Pendidikan Karakter. *Universum*, 10(1), 49–63. <https://doi.org/10.30762/universum.v10i1.223>
- Purwanto, Y., Hariyanto, Andono, A., & Hidayat, A. B. (2013). Konflik Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati di Cagar Biosfer Cibodas. In *Manajemen Hulu Cagar Biosfer Cibodas* (Issue 1, p. 272). CV Media Aksara.
- Purwanto, Y., Hartanto, Subagiadi, H., Sukandar, S., Susyafrianto, J., & Munawir, A. (2017). *Pedoman Pengelolaan Cagar Biosfer Indonesia*. FORDA PRESS-Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Purwanto, Y., Prasetya, B., Widayatmoko, D., & Environment, S. (2013). *Management Hulu : Pengelolaan Kawasan Cagar Biosfer Cibodas Management Hulu : Pengelolaan Kawasan Cagar Biosfer Cibodas* Editor : CV Media Aksara.

- Rakhmat, J. (2021). Psikologi Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sendjaja, S. Djuarsa. (2013). Pengantar Ilmu Komunikasi (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa, & Rahardjo, T. (2015). Teori Komunikasi Kelompok. In Teori Komunikasi (3rd ed., p. 707). Universitas Terbuka.
- Sobur, A., & Mulyana, D. (2020). Filsafat Komunikasi (P. Latifah (ed.); 4th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Soemirat, S., & Suryana, A. (2014). Komunikasi Persuasif (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Sugiyanto, D. R., Sumartias, S., Yulianita, N., & Komala, L. (2017). Motif Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Humas. Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi, 01(01), 657–667. <http://pknk.org/index.php/PKNK/article/view/47/52>
- Surono, A. (2012). Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(1), 55–91.
- Tadjudin, D. (1999). Model Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi. *Jurnal Seri Kajian Komuniti Forestri Seri 3 Tahun 2*.
- TNGGP, B. B. T. N. G. G. P. (2020). Statistik Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020.
- Widyatmoko, D. (2019). Strategi Dan Inovasi Konservasi Tumbuhan Indonesia Untuk Pemanfaatan Secara Berkelanjutan. Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek (SNPBS) Ke-IV 2019, Tabel 2, 1–22.
- Winoto, Y. (2016). The Application of Source Credibility Theory in Studies about Library Services. *EduLib*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.17509/edulib.v5i2.4393>
- Wood, J. T. (2009). Activate Your Everyday Encounters! The Resource Center for Interpersonal Communication : In Communication. Nelson Education, Ltd.